

The background of the book cover is a composite image. The upper portion shows a series of tall, classical columns, likely from a Greek or Roman temple, receding into the distance. The lower portion shows a rugged, mountainous landscape with a small, clear lake in the foreground. The overall color palette is warm, with yellows, oranges, and browns.

TRANSENDENSI HUKUM

PROSPEK DAN IMPLEMENTASI

Editor:

Absori

Kelik Wardiono

Shidarta

Aan Asphianto

TRANSENDENSI HUKUM: PROSPEK DAN IMPLEMENTASI

GENTA
PUBLISHING



Program Doktor (s3) Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhamamdiyah Surakarta

TRANSENDENSI HUKUM: PROSPEK DAN IMPLEMENTASI

©PDIH UMS

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan I, 2017

Editor	: Absori, Kelik Wardiono, Shidarta, Aan Asphianto
Penata Letak	: Ibnu Teguh
Perancang	: Ibnu Teguh
Sampul Pracetak	: Ridwan, SH., MH.
Produksi	: M. Tasyirul Afkar

Diterbitkan oleh:

GENTA PUBLISHING

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4

Jl. Rajawali Gedongan Baru Banguntapan, Bantul-
Yogyakarta INDONESIA

Telp. 081 332 732 896

WA. 081 2378 18611

BBM. 5BDAAE37

E-mail: redaksigenta@yahoo.com

Bekerjasama dengan:

Program Doktor (s3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhamamdiyah Surakarta

TRANSENDENSI HUKUM: PROSPEK DAN IMPLEMENTASI

Yogyakarta: GENTA Publishing 2017

x + 546 hlm. : 17 X 24 cm

ISBN: 978-602-1500-71-2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

Bagian I: MODEL PEMETAAN ALIRAN HUKUM DAN TRANSENDENSI

Beberapa Model Pemetaan Aliran Pemikiran Hukum

Oleh: *Shidarta*

Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia

Oleh: *Absori*

Paradigma Profetik: Eksplorasi Awal Pengembangan Basis Epistmologi Ilmu Hukum

Oleh: *Kelik Wardiono, Khudzaifah Dimyati, dan Ridwan*

Prinsip Keadilan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Studi Perspektif UU Tipikor dan Hukum Islam

Oleh: *Aan Asphianto, Fatkhul Muin*

Bagian II: RAGAM PEMIKIRAN TRANSENDENSI DALAM HUKUM

Pengujian Norma Hukum Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Oleh: *Agus Rasyid C. W. dan Haidan Angga Kusuma*

Perlindungan Nasabah Terhadap Penggunaan Kontrak Baku Kredit Dengan Agunan Pada Bank Syariah

Oleh: *Ahmad Fajar Herlani, Beggy Tamara*

Menyoal Transendensi Pancasila dan Menggali Basis Epistimologi Hukum Transendental Indonesia: Upaya Merawat Negara dari Skisma Sosial-Keagamaan

Oleh: *Sugeng Wibowo*

Transendensi Hukum: Keterlibatan Tuhan Dalam Putusan Hakim
oleh: *Fajlurrahman Jurdi dan Amaliah*

Memotret Transendensi Hukum Di Indonesia: Kajian Eksistensi dan Kompetisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Oleh: *Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin*

Urgensi Nilai-Nilai Spritual dalam Pembaharuan Hukum Pidana: Kajian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan	
Oleh: Kuswardani	
Orientasi Pengembangan Hukum Kesehatan: Perlindungan Hak Atas Kesehatan Berbasis Nilai Transedental	
Oleh: Fitriani Nur Damayanti	
Akuntansi Dalam Perspektif Transedental	
Oleh: Yuli Tri Cahyono	
Penemuan Hukum: Perbandingan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	
Oleh: Ahmad	
Bagian III: POTRET MORALITAS PENGEMBAN HUKUM DI INDONESIA	
Tanggung Jawab Moral Akuntan Publik Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Akuntansi	
Oleh: Herman Fikri	
Malpraktik Paramedik Pada Pelayanan Kesehatan Swasta: Potret Buram Hukum Kesehatan di Indonesia	
Oleh: Siti Soekiswati	
Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Dalam Persepektif UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam	
Oleh: Rully Syahrul Mucharom	
Penegakan Hukum dalam Dimensi Transedental	
Oleh: Ucuk Agiyanto	
Potret Integritas Moral Wakil Rakyat di Indonesia: Studi terhadap Penegakan Kode Etik di DPR RI	
Oleh: Siti Hasanah	
Moralitas Antikorupsi Pengemban Hukum Teoritis di Indonesia	
Oleh: Sulaiman	
Transedental Forensik Interview: Strategi Penyidikan Polisi Berkarakter Humanis untuk Mengungkap Kebenaran dalam Hukum Acara Pidana	
Oleh: Sri Waljinah	
Bagian IV: URGENSI PARADIGMA PROFETIK DALAM HUKUM	
Urgensi <i>Profetik Intelligence</i> Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Pembakar Hutan dan Lahan	
Oleh: Arief Heryogi, Hanugrah Titi Habsari	
Krisis Epistemologis Hukum Positivistik Menuju Pencerahan Baru dengan Paradigma Hukum Profetik	255
Oleh: Auliya Khasanofa	
Implementasi Keadilan Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan	266
Oleh: Mohamad Tohari	
Paradigma Transenden Dalam Penegakan Hukum	278
Oleh: Paryono	
Kritik Paradigma dalam Ilmu Hukum dan Paradigma Profetik sebagai Pemikiran Pembaruan Hukum di Indonesia	286
Oleh: Runggu Jayanuartha	
Tradisi Berhukum Profetik Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah	293
Oleh: Rifqi Ridlo Phahlevy	
Keadilan Profetik Dalam Peradilan: Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Profetik	307
Oleh: Usman Munir, Yulias Erwin	
Keadilan Hukum: Sebuah Tawaran Berbasis <i>Profetik Intelligence</i>	316
Oleh: Sigit Supto Nugroho, Elviandri, Farkhani	
Integrasi Teks dan Konteks: Perspektif Sejarah dan Ilmu Hukum Berparadigma Profetik	329
Oleh: Nurjannah S, Rina Rohayu	
Epistemologi Ilmu Hukum Transedental	341
Oleh: Yogi Prasetyo	
Kriminalisasi Gratifikasi Seks dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Profetik	349
Oleh: Muhammad Amin Hanafi	
Rekonstruksi Manajemen Amal Usaha Muhammadiyah dalam Persepektif Profetik	365
Oleh: Aries Isnandar	
Bagian V: AKAR TRANSENDENSI PANCASILA	379
Menggali Akar Transendensi Pancasila, Menuju Ilmu Hukum Berketuhanan Yang Maha Esa	381
Oleh: Muhammad Rustamaji	
Pancasila Sebagai <i>Modus Vivendi</i> Transedental	397
Oleh: Arief Budiono	
Akar Transendensi Pancasila Dalam Hukum	413
Oleh: Sinung Mufti Hangabei	

Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Pengembangan Hukum Indonesia	429
Oleh: <i>Any Farida</i>	
Konfigurasi Nilai Transedensi Pancasila	442
Oleh: <i>Naya Amin Zaini</i>	
Ideologi Politik Ham dalam Perspektif Negara Kesejahteraan	453
Oleh: <i>Jaka Susila</i>	
Perkembangan Hukum Perbankan Berbasis Transendental	463
Oleh: <i>Agus Prihartono PS, Rani Sri Agustina</i>	
Prinsip-Prinsip Akad, Refleksi Perjanjian Berdimensi Transendental	479
Oleh: <i>Septarina Budiwati</i>	
Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara:	488
Implementasi Nilai Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum	
Oleh: <i>Muhammad Chairul Huda</i>	
Bagian VI: TRANSENDENSI DAN LOCAL WISDOM	505
Nilai Transenden dalam Adat <i>Belis</i> Perkawinan Suku Kedang Nusa Tenggara Timur	507
Oleh: <i>Siti Syahida Nurani</i>	
Ritual <i>Cuci Kampung</i> dalam Perspektif Transendensi dan <i>Local Wisdom</i> : Kajian Tentang Adat Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Kota Bengkulu	517
Oleh: <i>Emma Ellyani</i>	
Rekonstruksi Doktrin Melawan Hukum: Dialog dan Integrasi Antara Norma dengan Nilai-Nilai Spiritual dan Kearifan Lokal	527
Oleh: <i>Hery Dwi Utomo</i>	
Dimensi Transendental Budaya Hukum Masyarakat Dayak Ngaju	539
Oleh: <i>Achmadi</i>	

PEMIKIRAN HUKUM TRANSCENDENTAL DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN ILMU HUKUM INDONESIA

Oleh : Absori¹

absorisaroni_@gmail. com

Abstrak

Pemikiran transendental menarik perhatian para pengasas ilmu, dianggap sebagai pemikiran alternatif masa depan ditengah keterpurukan paham positivistik ilmu dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Ilmu modern yang positivistik kini dianggap bukanlah segala galanya. Ragam pemikiran transendental dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas berupa nilai nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang. Ragam pemikiran hukum transendental dapat dilihat pada anasir pemikiran hukum progresif yang menekankan hukum untuk manusia dan membahagiakan yang dijalankan dengan penelekatan kecerdasan spiritual. Disamping itu juga terdapat pada hukum kontemplatif yang mendasarkan diri pada tuntutan rasional yang diperoleh melalui komunikasi rasional dan dialog argumentatif yang terbuka untuk meningkatkan proses pematangan ilmu hukum. Berhukum dengan hati hakikatnya memaduakn rasio dengan akhlaq dalam aktulisasi hukum dalam masyarakat. Sementara itu ilmu hukum profetik mendasarkan nilai-nilai yang didasarkan pada objektivisasi Al-Qur'an dan Hadits, juga berdasarkan upaya manusia (ijtihad) yang diperoleh dengan kemampuan potensinya melalui perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Dalam kontek pengembangan hukum di Indonesia mendasarkan pada ideologi negara, Pancasila, Pembukaan Konstitusi UUD 1945 dan Putusan Pengadilan yang menyebutkan demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci : HukumTransendental : Hukum Progresif, Kontemplatif dan Profetik

Pendahuluan

Pemikiran transendental menarik perhatian para pengagas ilmu, dianggap sebagai pemikiran alternatif masa depan ditengah dialektika paham rasionalis yang positivistik yang dianggap sudah tidak mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupan. Ilmu modern yang rasional-positivistik dianggap bukanlah segala galanya. Pemikiran transendental berkaitan dengan pemahaman yang menempatkan ilmu pada jangkauan yang lebih luas melampaui batas-batas normatif kaidah ilmu yang bersifat rasional. Para ilmuwan menempatkan kajian transendental pada bingkai ilmu yang bersifat metafisika atau supranatural karena melampaui batas-batas alam fisik, dan bersifat spiritual.

Immanuel Khan menggunakan istilah transendental sebagai pahaman yang melampaui batas batas pengalaman. Kaum skolastik, transendental dipahami bersifat superkategoris, yakni mencakup hal hal yang lebih luas dari kategori-kategori tradisional, yakni bentuk, potensi dan aksi. Transendental mampu mengungkap ciri universal dan adiindrawi dari yang ada yang ditangkap melalui instuisi yang melampaui pengalaman

¹ Dosen Fakultas Hukum dan Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

apapun. Transendental menunjukkan eksistensi melalui akumulasi kegiatan berpikir, kesadaran dan dunia. Transenden juga menunjukkan konsep yang bersifat universal melampaui kategori-kategori atau tidak dapat diperas ke dalam satu kategori saja.²

Transendental atau transendensi menurut Roger Garaudy dimaknai dalam tiga perspektif, yakni pertama, mengakui ketergantungan manusia kepada penciptanya. Sikap merasa cukup dengan diri sendiri dengan memandang manusia sebagai pusat dan ukuran segala sesuatu bertentangan dengan transendensi. Transendensi mengatasi naluri manusia, seperti keserakahan dan nafsu berkuasa. Kedua, transendensi berarti mengakui adanya kontinuitas dan ukuran bersama antara Tuhan dan manusia, artinya transendensi merelatifkan segala kekuasaan, kekayaan dan pengetahuan. Ketiga, transendensi artinya mengakui keunggulan norma-norma mutlak yang melampaui akal manusia.³

Pemikiran transendental dapat dilihat pada nilai nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang. Ilmu modern yang selama ini berada dalam koridor hegemoni modernis-positivistik dengan doktrin empiris, objektivis, dan rasional mulai digugat kaum pemikir transendental yang lebih mengedepankan nilai dan makna dibalik itu, sehingga tampak bangunan ilmu yang menjadi lebih terbuka dan utuh dalam merepon persoalan hidup dan kehidupan. Dalam hal ini, pemikiran transendental mulai mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional dan metafisika (emosi, perasaan, intuisi, nilai, pengalaman personal, spekulasi), moral, dan spiritual sebagai bagian integral dalam memahami keilmuan.

Hukum transendental dalam pengembangan ilmu hukum menekankan adanya integrasi antara ilmu hukum dengan agama yang menempati ruang dalam dunia ilmu menurut madzhab posmodernisme. Dalam hal ini ilmu dipahami dalam kaca mata jangkauan yang lebih luas, termasuk etik, moral dan nilai spiritual agama. Di sinilah agama menempati peran penting dalam upaya memahami hukum dan ilmu hukum dalam perspektif yang bersifat luas atau holistik.⁴ Dalam perspektif historis hukum posmodern menawarkan nilai spiritual sebagai akibat dari adanya krisis spiritual dalam hukum modern. Hukum yang ditawarkan menempatkan hukum tidak hanya formal, prosedur tetapi lebih mementingkan ilmu sebagai sebuah kesatuan (*the unity of knowledge*) yang mengkaitkan hukum dengan fakta empiris dan nilai nilai yang menyertainya termasuk etik, moral dan spiritual.⁵

Phillip Clayton⁶ mengatakan bahwa era sains modern yang positivistik telah berubah, yakni telah menerima keterbatasan-keterbatasan dalam prediksi (mekanika kuantum), aksiomatisasi, determinisme, atomisme maupun pemahaman berdasar hukum

² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 1996, hal 1118-1122. Lihat juga <http://id.wikipedia.org/wiki/Transcendental>.

³ M. Fahmi, *Islam Transendental, Menelusuri Jejak Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*, Pilar Religia, Yogyakarta, 2005, hal 97.

⁴ Absori, *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Proseding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm 34-49.

⁵ Absori, *Hukum dan Dimensi Spiritual (Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme)*, Proseding Konferensi ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya 27-29 Agustus 2013, hlm 1.

⁶ Lihat Philip Clayton dalam Absori, *Ilmu Hukum Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum", di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 11 April 2015, hal 3.

atas perilaku manusia. Menurut teori emergensi alam sesungguhnya terbuka ke atas. Hakikat kesadaran bersifat transendental. Hal ini telah memberi model yang sangat kuat bagi integrasi antara diri dan roh. Sebuah gambaran yang persis sama dengan apa yang diajarkan oleh agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam. Lebih lanjut dikatakan bahwa kini kita mulai melihat suatu renaissans, kebangkitan kembali metafisika (transendental), dari refleksi sistematis mengenai hakikat dan kreativitas Tuhan. Kaum modern yang positivistik boleh saja mengumumkan bahwa metafisika (transendental) sudah mati, akan tetapi, rasanya kini justru positivisme logislah yang duluan mati. Sangat menarik perhatian era pemikir teisme melalui dialog nilai Muslim, Yahudi dan Kristen yang kini kembali terlibat dalam eksplorasi yang sangat luas terhadap gagasan "hipotesis Tuhan" dan kreativitasnya.⁷

Dialog nilai, dalam bidang hukum dilakukan dengan mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam sampai alam tataran konseptual tipe hukum, yakni hukum tabiat Ilahi, hukum wahyu, hukum alam, hukum tabiat manusia dan perilakunya, serta hukum moral. Hukum tidak hanya aturan tetapi hukum juga harus bersumber pada nilai-nilai moral dan keadilan.⁸ Kegiatan atau pemahaman seperti itu dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tidak lagi diperlukan ketegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan sains. Tugas bersama yang perlu kita pikul adalah memperlihatkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan sesungguhnya akan mendukung hasil-hasil sains, dan kepercayaan kepada Tuhan merupakan jawaban atas pertanyaan mendasar yang diajukan ilmuwan, tetapi tidak dapat dijawab olehnya.⁹

Hukum Transendental

Mengkritisi kegagalan ilmu dan peradaban barat, Danah Zohar dan Ian Marshall¹⁰ dalam "*Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence*", mengenalkan berpikir spiritual (*spiritual tinkling*). Ary Ginanjar Agustian memadukan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual yang disebut Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dalam menjawab persoalan kehidupan manusia. ESQ merupakan konsep universal yang mampu mengantarkan seseorang pada predikat memuaskan bagi dirinya juga bagi sesamanya. ESQ dapat pula menghambat segala hal yang kontraproduktif terhadap kemajuan umat manusia. Ketiganya harus terpadu, tiada pemisahan antara dunia dan akhirat, antara keduanya mampu secara proposional bersinergi menghasilkan kekuatan jiwa raga yang seimbang.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo dengan pendekatan kecerdasan spiritual akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (*ultime intelegen*), dilakukan dengan cara menerabas

⁷ Paradigma sains transendental berangkat pada filsafat emergence. Manusia menyadari bahwa kejadian-kejadian dunia alamiah tidak dapat dijelaskan hanya mereduksi pada komponen-komponen terkecilnya, tetapi juga harus dikaitkan dengan obyek-obyek dan kejadian-kejadian lain dalam konteks yang lebih luas dimana mereka menjadi bagiannya. Di sini paradigma hukum mempunyai makna baru ketika kita mendaki tangga kemunculan berikutnya pada tataaran wujud yang mempunyai kehendak bebas seperti kita. Mendialogkan antara iman dan sains, hukum wahyu dan hukum dunia menjadi penting. Dialog nilai merupakan sumbangan pemikiran yang amat menjanjikan di masa mendatang.

⁸Ridwan, K. Dimiyati, dan Absori., *Relasi Hukum dan Moral : Sebuah Potret Antar Madzab dan Kontek KeIndonesiaan*, Prosiding Konferensi Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke-tiga, Purwokerto, 2015, Vol 1, hal 77-85..

⁹ *Ibid*, hal 5.

¹⁰ Danah Zohar dan Ian Marshall, *Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence*, Bloomsbury, London, 2000.

¹¹ Ary Ginanjar Agustian, *ESQ Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, Arga Publishing, Jakarta, 2009, hal xvii.

garis garis formalisme (*existing rule*) dan transendental, sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki (*the ultimate truth*). Manusia perlu *spiritual quotient* karena di masyarakat barat telah terjadi makna hidup di dunia modern (*the crisis of meaning*). *Spiritual quotient* merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. SQ dapat digunakan untuk membangkitkan potensi potensi kemanusiaan yang terpendam, membuat diri manusia semakin kreatif dan mampu mengatasi problem-problem esensial. SQ juga merupakan petunjuk ketika manusia berada di antara *order* dan *chaos*, memberikan intuisi tentang makna dan nilai. Di bidang hukum, ilmu hukum tidak lagi menempatkan diri pada posisi terisolasi secara intelektual berhadapan dengan perkembangan jaman. Apabila hukum berada dalam konteks dan peta tatanan (*order*) yang lebih besar maka substansi dan tatanan alternative diluar hukum positif senantiasa ada.¹²

Pemikiran yang mendasarkan pada kecerdasan spiritual sangat menarik untuk kajian hukum dalam rangka untuk menempatkan hukum pada hakikatnya dan menjadikan hukum dapat membahagiakan Manusia perlu *spiritual quotient* karena di masyarakat barat telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup di dunia modern (*the crisis of meaning*). *Spiritual quotient* merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan.¹³

Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*relu-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari keebenaran, makna atau nilai yang lebih dalam. Dengan demikian berpikir menjadi suatu infinite game. Ia tidak ingin diikat dan dibatasi patokan yang ada, tetapi ingin melampaui dan menembus situasi yang ada (transendental). Kecerdasan spiritual tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi kreatif dan membebaskan. Dalam kreativitasnya, ia mungkin bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (*rule breaking*) sekaligus membentuk yang baru (*rule making*). Kecerdasan spiritual sama sekali tidak menyingkirkan potensi intelegen dan emosi yang ada, tetapi meningkatkan kualitasnya, sehingga mencapai tingkat kecerdasan sempurna (*ultimate intelligence*).¹⁴

Di sini tampak menunjukkan bahwa ilmu pada hakikatnya satu (*the unity of knowledge*) yang E. Wilson dikonsepsikan dalam istilah "*Consilience*". Pergantian paradigma dalam ilmu fisika dari mekanik ke teori kuantum yang lebih kompleks, memberi pelajaran sangat berharga kepada studi hukum atau ilmu hukum. Memahami hukum tidak cukup hanya menggunakan pendekatan mekanik-positivistik analitis, dilihat secara linier dan mekanik. dengan perlengkapan peraturan dan logika, kebenaran tentang kompleksitas hukum tidak dapat muncul. Hukum telah direduksi menjadi institusi normatif yang sangat sederhana. Kebenaran antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain tidak (boleh) ditampilkan. Batas antara order dan disorder dilihat secara hitam putih.¹⁵

¹² Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besar*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal 11.

¹³ Danah Zohar dan Ian Mashal dalam Satjipto Rahardjo, *Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual*, Kompas, 30, Desember 2002.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal 10.

Satjipto Rahardjo mengenalkan paradigma hukum progresif, yang dimaknai sebagai hukum yang memakai paradigma manusia yang memedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*). Hukum adalah manusia bukan sebaliknya, sedang pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Hukum progresif mendasarkan diri pada sejumlah postulat¹⁶, yakni (1) Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum adalah alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. (2) Pro rakyat dan pro keadilan. Hukum harus berpihak kepada rakyat, dan keadilan harus didudukkan di atas peraturan. (3). Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia pada kesejahteraan dan kebahagiaan. (4). Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar ber hukum. (5). Hukum progresif berwatak responsif, yakni hukum dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum. (6). Hukum berhatinurani. (7). Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, yakni usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.

Dalam hal ini, hukum progresif memahami hukum dalam kaca mata yang utuh (holistik) yang berangkat dari filsafat natural (*natural law*) dengan visi universal yang lebih mengutamakan manusia sebagai subjek utama dalam ber hukum. Karena itu, hukum progresif lebih mengedepankan nurani, empati, kejujuran dan moralitas dari pada logika atau prosedur. Kehadiran hukum dalam rangka untuk membahagiaan manusia dan upaya memperoleh keadilan yang substantif. Hukum progresif juga mengakui bahwa kebenaran hukum tidak hanya berangkat dari kebenaran faktual (fisik) yang berada alam realitas masyarakat tetapi juga kebenaran metafisik (spiritual) yang bersifat ilahiyah yang sebenarnya mampu dijangkau dengan kemampuan potensi manusia, kaih sayang dan tanda tanda kekuasaan Allah yang terjabar pada alam semesta.

Hukum Kontemplatif

Hukum kontemplatif disadari oleh penggasnya Esmi Warassih cukup sulit karena hukum kontemplatif akan meliputi soal pendidikan hukum, kultur hukum termasuk filsafat tentang hakikat manusia sampai kepada nilai-nilai spirtual. Hukum kontemplatif memasuki komponen yang terdalam di tubuh manusia, yaitu nurani yang tidak bisa terlepas dari Sang Pencipta dan nurani juga yang dapat berkomunikasi dengan Pencipta dalam hal ikhwal menentukan baik buruk, benar tidak benar, adil tidak adil, manfaat mudharat, halal haram, dan seterusnya, karena persoalan tersebut tidak cukup ditangkap dengan mata kepala tetapi dengan mata hati manusia sebagai pengemban hukum.¹⁷

Esmi Warassih dalam “Sosiologi Kontemplatif” mengatakan bawa hukum harus diihat dalam tatanan yang lebih besar, yakni order yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Dikatakan dalam penciptaan langit, bumi dan manuisa diperlukan tatanan agar hubungan antar ciptaan dapat berjalan berkesinambungan dan bersemestaan. Tatanan yang adil diperlukan untuk mengatur baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam yaitu manusia dengan ciptaan yang lainnya. Ditegaskan bahwa hukum sesungguhnya hanya bagian kecil dari tatanan yang sangat besar yang satu dengan yang lain saling terkait. Tatanan yang sangat besar haruslah diberi makna dan bermakna bagi manusia. Ilmu hukum seyogyanya memperhatikan

¹⁶ Bernard T. Tanya, *Hukum Progresif : Perspektif Moral dan Kritis dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hal 39-40.

¹⁷ Esmi Warrasih, *Ilmu Hukum Kontemplatif (Surgawi dan Manusiawi)*, Konggres Ilmu Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), Semarang, 19-20 Oktober 2012, hal 3-4.

betul aspek yang fundamental ini. Relasi manusia dan lingkungannya menciptakan perkawinan makro dan mikro kosmos dan selanjutnya membentuk kehidupan di bumi. Tatanan dapat berupa tatanan alamiah yang berasal dari agama, tatanan kebiasaan (tidak tertulis) yang dalam perkembangan selanjutnya di abad modern, terutama di saat ini muncul tatanan artifisial yang disebut sebagai tatanan negara sebagai tatanan tertulis, bersifat universal dan berlaku umum.¹⁸

Hukum kontemplatif menurut Anthon F Susanto mendasarkan diri pada tuntutan rasional yang diperoleh melalui komunikasi rasional dan dialog argumentatif yang terbuka untuk meningkatkan proses pematangan ilmu hukum. Rasio tidak hanya sekedar beresensi tetapi juga bereksistensi dalam kenyataan. Rasio dalam ilmu hukum kontemplatif harus berfungsi melakukan penafsiran dalam mengartikulasikan kenyataan pergaulan yang begitu terbuka dan beragam.¹⁹ Pada posisi ini akhlaq memainkan peran yang penting sebagai pemandu dan jantung penggerak yang mengarahkan sekaligus mengaktualisasikan gagasan dalam realitas. Dalam hal ini ber hukum dengan hati hakikatnya memadukan rasio dengan akhlaq dalam aktualisasi hukum dalam masyarakat. Integrasi rasio dan akhlaq dalam ilmu hukum kontemplatif berfungsi menjebatani segala perbedaan melalui suasana dialog yang kondusif menuju humanisasi yang akan membimbing pada usaha untuk mencari pengertian dan persetujuan bersama secara demokratis, egaliter untuk mencapai tujuan yang lebih bermakna.²⁰

Hukum kontemplatif yang digagas Esmi Warassih menurut Anthon F Susanto menghadirkan sebuah disiplin ilmu hukum baru, yakni membangun ilmu hukum yang berwatak sosial dan sekaligus religius-spiritual. Karena itu hukum kontemplatif perlu dikembangkan dalam kurikulum pendidikan hukum yang didalamnya memadukan muatan kecerdasan IQ, EQ dan SQ. Ilmu hukum kontemplatif perlu berdialog untuk membuka cakrawala baru, tantangan baru, kritik dan perbaikan dari luar. Diharapkan bahwa ilmu hukum kontemplatif dapat mendorong hukum agar dapat mewujudkan tujuan keadilan, kesejahteraan dan membangun manusia Indonesia yang berwatak luhur dan bermoral, berbudi pekerti dan menjunjung tinggi harkat manusia...²¹

Dalam khasanah dunia Islam terdapat model pemikiran kontemplatif seperti tersebut di atas yang menawarkan model mengintegrasikan ilmu yang rasional dan nilai yang berangkat dari hati yang transendental. Filusuf Ibnu Arabi²² dikenal sebagai peletak tasawuf falsafati yang sebelumnya diajarkan Dzun Nun al-Mishri yang dikenal sebagai peletak model irfani yang bertumpu pada konsep makrifat (transendental) yang menggabungkan antara pendekatan hati (*qolbu*) dan pendekatan rasional (akal). Dzun Nun al-Mishri dikenal sebagai peletak unsur filsafat dalam tasawuf melalui metode

¹⁸ Esmi Warrasih dalam Anthon F. Susanto, *Basis Ontologi Ilmu Hukum Kontemplatif, Berhukum dengan hati, Seminar Nasional Merepleksikan dan Menguraikan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik*, Universitas Diponegoro, Semarang, 20-21 Oktober 2016, hal 34.

¹⁹ Anthon F. Susanto, *Basis Ontologi Ilmu Hukum Kontemplatif, Berhukum dengan hati, Seminar Nasional Merepleksikan dan Menguraikan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik*, Universitas Diponegoro, Semarang, 20-21 Oktober 2016, hal 45.

²⁰ *Ibid*, hal 46.

²¹ *Ibid*, hal 48-49.

²² Ibnu Arabi lahir Andalusia, Spanyol (1169 M), belajar ilmu banyak ilmu, khususnya yang berkaitan dengan ilmu rahasia-rahasia Illahi (Kasyf), selama beberapa tahun tinggal di Sevilla, Spanyol dan kemudian berpindah ke Dunia Islam Timur, Dalam karyanya dikritisi pemiir sesudahnya, seperti Ibnu Taimiyah (1263-1328) yang menilai ajaran Ibnu Arabi dalam karyanya wahdatul wujud mengandung pantheisme yang menyamakan Tuhan dengan makhluknya.

integrasi yang dianggap kontraversial²³. Tasawuf falsafi menjelaskan hukum yang rasional dan alam transendental yang dianggap misteri, yang pada hakikatnya dalam rangka meraih cinta Allah setinggi-tingginya dan berusaha menjadi kekasih-Nya. Oleh para pendukungnya dianggap sebagai bentuk upaya mencontoh apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW yang juga memiliki gelar sebagai *habibullah* (kekasih Allah).

Al-Ghazali yang dikenal tokoh tasawuf akhlaqi dengan karya yang amat monumental *ihya ulumiddin* tidak setuju dengan model tasawuf falsafi yang mengarah pada imanensi dalam hubungannya antara manusia dengan Tuhannya. Menurut Lukman Hakim, Al-Ghazali sebenarnya telah memadukan antara tasawuf falsafi dan tasawuf amali menjadi tasawuf akhlaqi dan Al-Ghazali dianggap telah berhasil secara epistemologi dalam memadukan syariat dan hakikat. Hal ini berkaitan erat membuat model hubungan antara ilmu dan nilai spiritual.²⁴ Di kalangan ilmuwan, tasawuf falsafi dikenal sebagai metode yang memadukan antara olah spiritual dan filsafat yang diambil dari berbagai sumber filsafat. Filsafat ini telah memberikan sumbangan besar dalam khazanah intelektual Islam baik di Timur, seperti di Indonesia maupun masyarakat barat.

Hukum Profetik

Kuntowijoyo²⁵ memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minuna billah*). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan Ilmu pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat Kauniyah) sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (Ayat Nafsiyah) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun ketuhanan (Ayat Qauliyah) sebagai basis hukum-hukum Tuhan²⁶.

Pemahaman terhadap hal ini diarahkan untuk menemukan unsur-unsur yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Dalam kaitan dengan hukum manusia sebagai subjek sekaligus penerima amanah untuk menjalankan hukum-hukum ilahi yang telah pasti dan ditetapkan melalui wahyu (Al-Quran) dan tradisi kerasulan (*sunnah*) atau hadits. Manusia dapat melakukan reorientasi cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif, melakukan teorisasi selain menggunakan normativitas ajaran, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis dan merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi yang spesifik dan empiris.

Dalam hal ini Islam dan hukum Islam merupakan upaya yang sistematisasi konsep dasar dari nilai-nilai syariah tentang fondasi kehidupan dimana orientasinya untuk mewujudkan hakikat kehidupan dalam beragama dan berhukum melalui maqashid al-syariah. Islam sebagai ad-dien telah memberikan dasar bagi umat muslim melalui Al-

²³ Konsep Dasar Filosofis Pemikiran Ibnu Arabi, Jurnal Tajdid, Volume XI No. 2, 2012.

²⁴ Lukman Hakim, Madzab Tasawuf Saling Bertemu, Republika, 22 Maret 2015, hal 16.

²⁵ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan, Bandung, 2001, hal 364.

²⁶ Kunto wijoyo, *Islam sebagai Ilmu : Epistimologi, Metodologi dan Etika*, Teraju (PT Mizan Publika), Jakarta, 2004, hal 27.

Quran dan Sunnah. Keduanya berisi pedoman dan penunjuk berupa nilai-nilai kehidupan, termasuk penerapannya dalam dunia ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari.²⁷

Dari uraian tersebut dapat dikatakan²⁸ bahwa ilmu dalam pandangan profetik disamping bisa digali berdasarkan Al-Quran dan Hadits juga terdapat *Maslahat Mursalah*, yang merupakan sumber hukum tambahan berdasarkan penelitian empiris yang diperoleh dari penonena alam dan perilaku masyarakat, ditemukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Hal tersebut didasarkan pada Al-Quran yang menyebutkan "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Nabi), melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta*" (QS Al-Anbiya, ayat 107)

Kemaslahatan dapat ditangkap secara jelas oleh orang yang mempunyai dan mau berfikir, sekalipun dalam kasanah pemikiran Islam terdapat perbedaan dalam memahami hakikat masalah. Perbedaan tersebut bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang perorang dalam menafsirkan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits, dimana masing-masing ahli pikir mempunyai keterbatasan. Sehingga tidak mampu memahami hakikat masalah secara sama, karena adanya perbedaan yang bersifat temporal dan kondisi daerah (lokal) yang tidak sama.

Dimensi profetik bisa dilihat pada ajaran yang paling dasar, yakni *aqidah* yang mengajarkan pemahaman hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. Manusia dan alam pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat *fana*, sementara Tuhan adalah penguasa atas alam semesta beserta isinya (*robbul alamin*) yang bersifat kekal (*baqa*). Kebahagiaan terbesar seorang muslim mana kala dia mampu pasrah secara totalitas mematuhi perintah (hukumhukum) Allah yang bersifat kodrati (*sunnahtullah*), baik yang bersifat umum ataupun yang terperinci, sebagai konsekuensi dari pengakuannya bahwa Allah Maha Esa, penguasa segalanya, dan segala makhluk bergantung padanya-Nya.

Ilmu profetik menurut Kuntowijoyo berawal dari agama, teoantroposentris, dediferensi (penyatuan ulang) dan menjadi ilmu yang bersifat integralistik atau memadukan ilmu dan agama. Posisi wahyu dalam paradigma profetik adalah teori umum (*grand theory*) yang harus diturunkan ke tahapan teoritis hingga praktis. Agama sebagai sistem pengetahuan yang berada dalam dua kutub antara objektifitas dan subjektifitas, ia tidak berdiri sendiri atau bahkan mendaulat dirinya sebagai majikan ilmu.²⁹

Dalam hukum profetik, ilmu hukum bukan hanya didasarkan pada kebenaran pada taraf *haqq aliyakin*, yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah.

²⁷ Absori, Af Azhari, MM Basri, dan F. Muin, *Transformation of Maqashid Al-Syariah (An Overview of The Development of Islamic Law In Indonesia)*, Jurnal Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2016, Vol 11, No 1, hlm. 1-18.

²⁸ Absori, *Ilmu Hukum* Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum", di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 11 April 2015, hal 8.

²⁹ Absori, Kelik dan Saepul Rochman, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal 367.

Ilmu hukum profetik hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah (inmaterial). Ilmu hukum transendental tidak dapat dipisah antara jasad fisik (formal) dan nilai-nilai transendental. Justifikasi ilmu hukum transendental semata yang diburu adalah demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat yang Maha Kuasa, penentu hidup dan kehidupan manusia. Ilmu hukum transendental berorientasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang untuk makhluknya. Disamping itu dibutuhkan adanya moral dalam hukum dengan berdasarkan pada paradigma profetik yang berdasarkan pada nilai-nilai ilahiyah.³⁰

Keadilan hukum dalam pandangan ilmu profetik menurut Kuntowijoyo berdasarkan pada pengertian yang dinyatakan oleh Quraish Shihab bahwa setidaknya ada empat makna keadilan: sama, seimbang, perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, dan adil yang dinisbatkan kepada Allah. Menurut Quraish Shihab, keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Al-Quran amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pada pihak yang berselisih (QS. 4 : 58), melainkan juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri baik ketika berucap (QS. 6 : 152), menulis atau bersikap batin (QS. 2 : 282) bahkan tujuan Allah mengutus para rasul pun sebenarnya untuk menegakan keadilan.³¹ Dalam hal ini hukum Islam tidak hanya berdasar pada doktrin normatif berupa perundang-undangan negara tetapi juga nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia.³² Disamping itu dibutuhkan adanya moral dalam hukum dengan berdasarkan pada paradigma profetik yang berdasarkan pada nilai-nilai ilahiyah.³³

Kelik Wardiono dalam disertasinya menyebutkan bahwa paradigma ilmu hukum profetik secara singkat disebutkan sebagai berikut : (1) objek ilmu hukum adalah norma, berupa norma dalam dunia normatif relatif yang berdialektik dengan dunia idea dan dunia empiris secara simultan, sebagai kata kunci dalam memahami aspek ontologi, (2) integrasi antara ilmu dan agama sebagai kata kunci dalam memahami aspek epistemologi, dan (3) keadilan sebagai kata kunci dalam memahami aspek aksiologi.³⁴

Pengembangan dalam Konteks Indonesia

Pada era global negara dituntut mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam segala bidang. Hukum harus tetap bersandikan pada ideologi yang sarat dengan nilai-nilai keTuhanan yang bersifat transcendental.³⁵ Hukum transendental dalam konteks Indonesia tidak boleh lepas dari prinsip dasar yang terdapat pada ideologi negara berupa

³⁰ K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani., *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1, hal.23..

³¹Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 112-114.

³² Fatkhul Muin dan Absori, *Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia dalam Kerangka Al-Masalih)*, Jurnal Ar-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 15 No. 2, 2016, hal.1.

³³ K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani., *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1, hal.23..

³⁴ Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik, Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*, Disertasi Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2016, hal 189.

³⁵Absori, *Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2010, hal 1..

Pancasila.³⁶ Inti Pancasila yang terdiri dari lima sila, berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Menurut bapak pendiri bangsa Soekarno inti pancasila kalau diperas berupa gotong royong. Dalam bidang hukum, manifestasi dari ideologi Pancasila terjabarkan dalam cita hukum pancasila yang berfungsi sebagai fondasi dan arah dari pembangunan dan pengembangan hukum nasional. Cita hukum pancasila dimaknai sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat sendiri. Dalam hal ini terdapat tiga unsur, yakni keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum.³⁷ Kiranya perlu dipikirkan pendekatan yang menekankan pada pendekatan hubungan yang bersifat humanis transcendental, yang menekan pentingnya hubungan baik dan mencegah kemungkaran dan pengawasaan antar para pihak atau lembaga yang bersifat ilahiyah, yakni adanya komitmen dan tanggung jawab kepada Tuhan.³⁸

Dalam dinamika kehidupan masyarakat Pancasila sebagai cita hukum akan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani, norma kritik dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum. Dalam hal ini tata hukum merupakan sebuah eksemplar ramifikasi cita hukum ke dalam berbagai kaidah hukum yang tersusun dalam sebuah sistem. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan hukum seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum. Oleh bapak pendiri bangsa, Pancasila ditempatkan sebagai landasan filsafat dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara. Pancasila dimaknai sebagai pandangan hidup bangsa yang mengungkap tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesamanya dan manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individu di dalam masyarakat dan alam semesta.

Pancasila selain sebagai komponen pokok sistem nilai hukum nasional dan *staatsfundamentalnorms*, termasuk dalam lingkup kefilosofatan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai filsafat dapat ditinjau paling tidak menurut Abubakar Busro dengan tiga kenyataan, yakni kenyataan materiil (dari jangkauan dan isinya bersifat nilai-nilai fundamental, universal, komprehensif, dan metafisis, bahkan pokok-pokok pengajarannya meliputi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan), kenyataan fungsional praktis (merupakan jalinan tata nilai dalam sosio-budaya bangsa Indonesia, sehingga wujudnya dapat dilihat berupa adanya prinsip kepercayaan kepada Tuhan, tepa selira, setia kawan, kekeluargaan, gotong-royong, musyawarah-mufakat, dan lain-lain), dan kenyataan formal (para Pendiri negara mengangkat dan merumuskan Pancasila sebagai ideologi yang wujudnya tampak dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia).³⁹

Hukum bersendikan Pancasila bertolak pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang berkeyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia dan alam sebagai suatu keseluruhan terjalin dalam hubungan yang harmonis diciptakan oleh Tuhan.

³⁶ Absori dkk, *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, Pustaka Itizam, Surakarta, 2016, hal 9.

³⁷ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Fundadi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hal 214.

³⁸ Absori, Kelik dan Saepul Rochman, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal 259..

³⁹ Agus Budi Susilo, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Perspektif XVI No. 4 September, 2011, hal. 247.

Kehadiran manusia di dunia dikodartkan dalam kebersamaan dengan sesamanya, namun tiada manusia memiliki kepribadian yang unik yang membedakan yang satu dengan yang lain. Di sinilah terdapat kesatuan dalam perbedaan. Disamping itu kebersamaan (kesatuan) memperlihatkan kodrat kepribadian yang berbeda dan unik, yang berarti terdapat perbedaan dalam kesatuan. Kodrat perbedaan tersebut tidak bisa disangkal tanpa melibatkan kodrat kemanusiaan, yang dapat diwujudkan dalam kehidupan di dalam masyarakat.⁴⁰

Dalam konteks Indonesia hukum berparadigma ketuhanan atau profetik tidak berhenti pada pluralisme hukum yang menghargai perbedaan sebagai suatu konstruksi sosial yang alamiah akan tetapi juga melampauinya dengan jalan integralisasi melalui kompromi hukum yang mengakomodasi nilai-nilai Ilahiyah. Metode yang dipakai dilakukan dengan cara interobjektifikasi yang dihasilkan melalui pengalaman batin agama, kehendak sipil, kebijakan, kearifan, kekuasaan hukum dan identitas kebudayaan.⁴¹

Dalam pengembangan hukum Indonesia terdapat pijakan yang mendasari nilai-nilai transendental yakni ideologi negara Pancasila, Pembukaan Konstitusi UUD 1945 yang memuat bahwa proklamasi kemerdekaan negara Indonesia adalah atas Berkah Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa. Pembukaan UUD 1945 merupakan kesepakatan kokoh (*mitsaqon gholidhon*) para pendiri bangsa yang menjadi dasar bangunan negara yang merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa. Pembukaan UUD 1945 merupakan ruh spiritual sebagai keniscayaan yang tidak bisa diubah.⁴² Pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pada putusan pengadilan yang memuat irah-irah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat 2). Hakim wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (Pasal 5 ayat 3). Menurut Djohansyah putusan hakim yang dilahirkan dari keyakinannya, akhirnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban sikap moral sang hakim yang dialamatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni figure yang diyakini maha tahu akan isi hati setiap manusia.⁴³ Di sini tampak jelas bahwa hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi yang konsekwensinya harus mempertanggungjawabkan putusannya di hadapan Illahi Rabbi. Ketukan palu seorang hakim tidak boleh dilakukan berdasarkan kepentingan dirinya atau kepentingan yang mengitarinya tetapi harus dilakukan semata demi keadilan Tuhan.

⁴⁰ Bernard Arief Sidharta, *ibid.*, hal 217.

⁴¹ Absori, Kelik dan Saepul Rochman, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal 388.

⁴² Lihat Kompas, 7 Februari 2017, hal 4.

⁴³ Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hal 272.

Daftar Pustaka

- Absori, Kelik dan Saepul Rochman, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015
- Absori, Af Azhari, MM Basri, dan F. Muin, *Transformation of Maqashid Al-Syariah (An Overview of The Devolepment of Islamic Law In Indonesia)*, Jurnal Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2016, Vol 11, No 1,
- Absori dkk, *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, Pustaka Iltizam, Surakarta, 2016.
- , *Ilmu Hukum Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Seminar Nasional dengan Tema “Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum”, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 11 April 2015
- Agustian, Ary Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasar Emosi dan Spiritual, ESQ, Emotional Spiritual Quotient*, Penerbit Arga, Jakarta, 2004.
- Anthon F. Susanto, *Basis Ontologi Ilmu Hukum Kontemplatiff, Berhukum dengan hati*, Seminar Nasional Merepleksikan dan Menguraikan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Universitas Diponegoro, Semarang, 20-21 Oktober 2016
- Anshori, *Integrasi Keilmuan atas UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang 2007-2013*, Ringkasan Disertasi UIN Yogyakarta, 2014
- Clayton, Philip, *Membaca Tuhan dalam Keteraturan Alam, Repleksi Ilmiah dan Religius*, Makalah Disampaikan pada Intmasional Conference on Religion and Scieence in the Post-Colonial Word, Yogyakarta, 2003.
- Djohansyah, J., *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008.
- Fahmi, M. *Islam Transendental, Menelusuri Jejak Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*, Pilar Religia, Yogyakarta, 2005.
- Fatkhu Muin dan Absori, *Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di ndonesia dalam Kerangka Al-Masalih)*, Jurnal Ar-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 15 No. 2, 2016.
- K. Dimyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani,, *Morality and Law Critics Upon HLA Hart’s Moral Paradigm Epistimology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1.
- Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu : Epistimoogi, Metodologi dan Etika*, Teraju (PT Mizan Publika), Jakarta, 2004.
- , *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan, Bandung, 2001.

- Rahardjo, Satjipto, "*Paradigma Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah*", Makalah. *Symposium Nasional Ilmu Hukum Tentang Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia*, Program S3 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 10 Pebruari 1998.
- _____, *Menjalankan Hukum dengan Kecerdasaan Spiritual*, Kompas, 30 Desember 2002.
- _____, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003,.
- Samford, Charles, *The Disorder of Law, Acritical of Legal Theory*, Basil Blackwell Inc. New York, USA, 1998.
- Sidharta, Bernard Arief , *Refleksi tentang Fundadi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.
- Agus Budi Susilo, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Dalam perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Perspektif XVI No. 4, Sepember 2011
- Tanya, Bernard, *Hukum Progresif : Perspektif Moral dan Kritis dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Wardiono, Kelik, *Paradigma Profetik, Pembaruan Basis Epistimologi Ilmu Hukum*, Disertasi Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Wilson, Edward, *Concilience, The Unity of Knowlwdge*, Alfred A. Knopf, New York, USA, 1998.
- Zohar, Danah dan Marhal Ian, *Spiritual Intellegence, The Ultimate Intellegence*, Bloomsbury, Landon, 2000.